

DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press
- Darwin, Muhajir. 2005. Negara dan Perempuan “Reorientasi Kebijakan Publik”. Yogyakarta: Media Wacana.
- Fakih, Mansour. 2008 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Gerston, L, N 1992. Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement terj. (New York : M.E Sharp, inc)
- Hafidz, Wardah 1995. Daftar istilah jender. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Hamidi. 2004 *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Penelitian*. Malang : UMM PRES.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXI; Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Madani, Muhlis. 2011. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono Bambang dkk .2003 Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu.
- Mosse, J.C. 1996. “Apakah gender itu?” Dalam Mansour Fakih, Gender dan pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Nawawi dan Martini. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sabatier, Paul A. and Weible, Chistopher W. (2007) ”A Guide to Advocacy Coalition Framework”, Dalam Fischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney Eds. Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics and Methods, Boca Raton : CRC Press.
- Subarsono, A.G. 2013 *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Utama.

- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja grafindo Perkasa.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sutrisno, Muji. Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Kansius : Yogyakarta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tulungagung: Akademia Pustaka,.
- Suwitri, S. 2008 *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Syamsuddin,dkk. 2005. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method)*, Makassar: Wade Group.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

2. Jurnal

- Mahmud, Favian Laksono Mahmud, *Interaksi Aktor Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta)*, Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Tamrin, M. Husni. 2017. *Interaksi Aktor Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan, Surkkamadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF)*, JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5(2), 141-158 ISSN 2338-445X (print), ISSN 2527-9246 (online).
- Nurwita Kurniawati dkk, *Analisis Multi Stakeholders Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus CSR PT. Charoen Pokphand Indonesia Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*,
- Esa, Radin Fadhillah . 2016. Pertarungan Kepentingan Politik Dalam Pembuatan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015, Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 2, April - Juli 2016, 256 – 267.*
- Bintari, Antik. 2016, *pembuatan kebijakan pemerintah tentang badan usaha milik daerah (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) Mass rapid Transit (MRT) Jakarta di provinsi DKI Jakarta, Jurnal ilmu pemerintahan 2(2), 220-238.*

Fahrul Rijal dkk. 2013, Interaksi Aktor Dalam Pembuatan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara, Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. III No.2 Oktober.

Rhodes. R.A.W. (2007). *Understanding Governance: Ten Years On*. SAGE Publication, 28(08), 1-22. DOI 10.1177/0170840607076586.

1. Disertasi

Nadir, Sakinah. 2021, Strategi Aktor Dalam Politik Pembangunan Kota: Studi Kasus Kebijakan Program Reklamasi Pantai di Kota Makassar, disertasi UGM.

4. Website

Badan Pusat Statistik

Undang-undang dan Peraturan :

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Penelitian

1. Mario David Pn, S,Sos (DPRD Kota Makassar/ ketua pansus Perda) wawancara Pada tanggal 26 Mei 2022.



2. Ratna Kahali (Aktivis Lingkungan) Wawancara, Pada Tanggal 28 Mei 2022.



Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29775/S.01/PTSP/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3468/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 12 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SULFIANA**
 Nomor Pokok : E052192005
 Program Studi : Ilmu Politik
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
 Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" **ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN)** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 April s/d 13 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 13 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
 1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 13-04-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.su.sulprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Lampiran 2. Surat Izin penelitian dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 14 April 2022

K e p a d a

Yth. KETUA DPRD KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/272 -II/BKBP/IV/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 29775/S.01/PTSP/2022 Tanggal 13 April 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : SULFIANA
NIM / Jurusan : E052192005 / Ilmu politik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Tanggal pelaksanaan: 13 April s/d 13 Mei 2022
Jenis Penelitian : Tesis
Alamat : Jl. P.Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : "ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN)"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL



DR. HARI, S.I.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat & Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.